

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

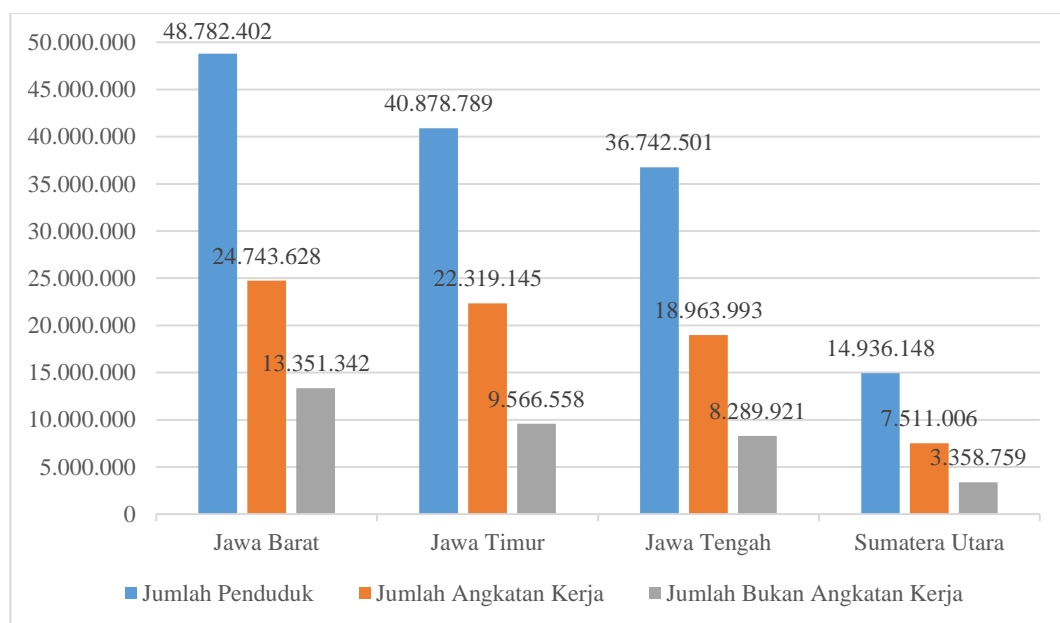
Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tubuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi.

Proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih bermutu. Menurut Dumairy (1996) sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Sektor industri adalah sektor yang saat ini berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan PDRB tahunan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan salah satunya dengan cara mengedepankan sektor industri.

Perluasan penyerapan tenaga kerja dibutuhkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk kedalam kategori pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian

meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumberdaya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang (Depnakertrans, 2004).

Berdasarkan sumber data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Untuk melihat jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja dari keempat provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia bisa dilihat dalam gambar 1.1.

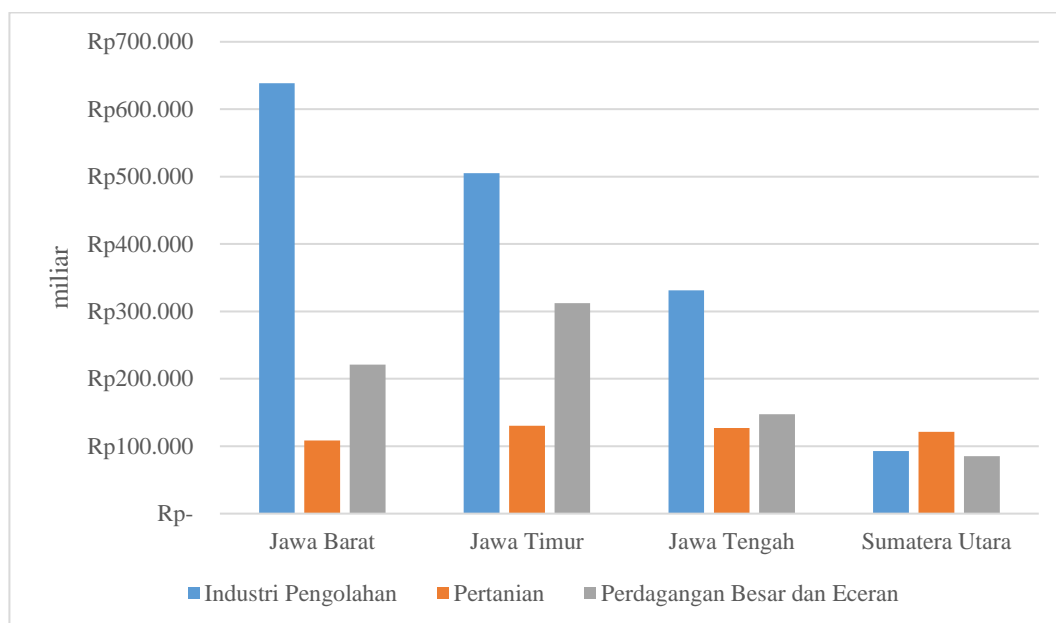


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Data Kependudukan dan Tenaga Kerja pada Tahun 2021 (Jiwa)

Semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin besar pula jumlah angkatan kerja yang tersedia. Melalui data dari Badan Pusat Statistik, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat dengan total populasi 48,78 juta jiwa dan angkatan kerja sebanyak 24,74 juta jiwa. Diikuti Provinsi Jawa Timur dengan total populasi 40,87 juta jiwa dan angkatan kerja sebanyak 22,31 juta jiwa, Jawa Tengah dengan total populasi 36,74 juta jiwa dan angkatan kerja sebanyak 18,96 juta jiwa, dan Sumatera Utara dengan total populasi 14,93 juta jiwa dan angkatan kerja sebanyak 7,51 juta jiwa.

Perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 terus berlanjut dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi terus ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Berdasarkan dari sisi *supply*, sektor industri pengolahan menjadikan penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia dengan mencapai level kontribusi sebesar 19,25% terhadap PDB nasional. Diikuti sektor pertanian nasional yang turut berpotensi mendorong kinerja ekspor komoditas unggulan Indonesia untuk melanjutkan surplus neraca perdagangan yang telah terjadi selama 14 bulan berturut-turut hingga mencapai kontribusi senilai 13,28% terhadap PDB nasional. Selain itu, sepanjang tahun 2021 sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor terbesar ketiga nasional dan mencatat kontribusi sebesar 12,97% terhadap PDB nasional. Untuk melihat perbandingan PDRB atas harga konstan menurut lapangan usaha berdasarkan keempat provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia, bisa dilihat pada Gambar 1.2.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2021 (Miliar Rupiah)

Secara nasional ketiga dari sektor lapangan usaha pada Gambar 1.2 menjadi urutan yang paling banyak berkontribusi dalam perekonomian di Indonesia. Tercatat dari keempat provinsi pada Gambar 1.2, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mencatat industri pengolahan menjadikan sektor yang paling berkontribusi dalam pembentukan PDRB.

Sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat menjadi kontributor terbesar bagi struktur PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 yaitu sebesar 41,81%, dibandingkan dengan sektor pertanian di Jawa Barat sebesar 8,54%. Jawa Barat selama dari tiga dekade telah merasakan perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa, di samping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor

industri terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi. Kemenperin mencatat, saat ini secara keseluruhan terdapat 42 kawasan industri di Jawa Barat yang telah memiliki izin usaha kawasan industri dan telah beroperasi dan seluruh kawasan industri tersebut menempati lahan lebih dari 19.602,92 hektare.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 2010 dalam Dama dkk., 2016). Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan (Todaro dan Smith, 2006). Sektor industri pengolahan memiliki peran utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi setiap tahunnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dimana dapat memperluas kesempatan kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat pada triwulan III berangsur membaik, searah dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang positif. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 mencapai 38,09 juta jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada bulan Agustus 2021 tercatat 64,95% atau naik 0,42% poin dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2020 dan naik 0,12% poin dibandingkan Februari 2021. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 tercatat sebesar 9,82% atau turun sebesar 0,64% poin dibandingkan keadaan pada Agustus 2020. Untuk melihat gambaran perkembangan

dan kesejahteraan Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir, dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan dan Kesejahteraan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Penduduk Usia Kerja (Jiwa) | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen) | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen) |
|--------------|-------------------------------|--|---|--|
| 2017 | 48.037.827 | 35.353.191 | 63,34 | 8,22 |
| 2018 | 48.683.861 | 35.963.185 | 62,92 | 8,17 |
| 2019 | 49.316.712 | 36.584.124 | 64,99 | 8,04 |
| 2020 | 48.274.162 | 37.512.832 | 64,53 | 10,46 |
| 2021 | 48.782.402 | 38.094.970 | 64,95 | 9,82 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Di negara-negara berkembang, perubahan struktur ekonomi yang didominasi oleh pertanian menjadi ekonomi yang didominasi oleh sektor industri menjadi salah satu langkah paling populer menuju percepatan pertumbuhan termasuk di Indonesia, maka yang menjadi poin utama adalah mengikuti alur perkembangan teknologi dan memanfaatkan hal tersebut. Pertama, soal jumlah penduduk yang begitu besar akan memerlukan sumber daya dan energi yang luar biasa dari alam, belum lagi dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan pembangunan. Kedua, teknologi yang berkembang melampaui kemampuan kendali manusia untuk mengaturnya. Ketiga, persoalan moral ketika pembangunan tidak dapat menciptakan perbaikan, tetapi justru menimbulkan kerusakan lingkungan dan kehancuran daya dukung kehidupan (Al Gore, 2007 dalam Baiquni, 2009).

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia setelah sektor pertanian. Sektor ini sebagai penyumbang dalam pembentukan PDB

Indonesia, bahkan sektor industri mampu menjadi sektor utama (*leading sector*) pada tahun 1991 mengalahkan sektor pertanian dalam menyumbang pembentukan PDB (Subandi, 2019 dalam Nurfaela, 2020). Industri menurut undang-undang tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Pembangunan ekonomi yang mengarah pada industrialisasi dapat dijadikan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi lapangan pekerjaan (Simanjuntak, 1985 dalam Saputri dan Gunawan, 2018). Secara nasional, industri menciptakan produktivitas dan peningkatan kualitas lapangan kerja. Optimalisasi industri membawa hasil nilai tambah terhadap perekonomian serta menciptakan efek pengganda yang sangat besar, hasil dari keunikan sektor industri yang memiliki *backward linkage* dan juga *forward linkage* sehingga bisa memberikan perbaikan bagi seluruh sektor, bukan hanya sektor industri tertentu.

Pertumbuhan jumlah unit usaha di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun terus meningkat dan secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja baru. Sejumlah 216.671 industri besar, menengah, dan kecil yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1.640 industri jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tingginya kontribusi sektor industri pada pertumbuhan ekonomi sangat memungkinkan untuk terbukanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Ini merupakan solusi atas bertambahnya

penduduk di Provinsi Jawa Barat atas kekosongan lapangan kerja baru, dengan bertambahnya penduduk usia kerja dengan bertambahnya jumlah unit industri akan mengurangi dampak buruk yang bisa terjadi seperti kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 1.2 Jumlah Unit Usaha Industri dan Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap pada Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

| Tahun | Jumlah Unit Usaha (unit) | Jumlah Penduduk Usia Kerja (jiwa) | Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap pada Industri Pengolahan (jiwa) |
|--------------|---------------------------------|--|--|
| 2017 | 213.291 | 35.353.191 | 5.482.225 |
| 2018 | 214.026 | 35.963.185 | 5.625.445 |
| 2019 | 214.560 | 36.584.124 | 5.668.705 |
| 2020 | 215.031 | 37.512.832 | 5.670.237 |
| 2021 | 216.671 | 38.094.970 | 5.721.515 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dan Open Data Jabar

Jumlah sektor industri pengolahan yang ada di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 jumlah unit usaha sebanyak 213.291 unit dan pada tahun 2021 jumlah unit usaha menjadi 216.671 unit. Dan berpengaruh juga terhadap tenaga kerja yang terserap terus meningkat selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2018 jumlah unit usaha 214.026 unit dengan tenaga kerja sebanyak 5.625.445 orang, hal ini merupakan peningkatan tenaga kerja terbanyak yang terserap jika dilihat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 yang meningkat 143.220 orang, sedangkan peningkatan tenaga kerja pada tahun 2021 setelah adanya pandemi Covid-19 sebanyak 51.278 orang.

Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, perluasan sektor industri dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan *output* produksi secara konstan dalam jangka panjang. Untuk itu kontribusi sektor industri sangatlah penting dalam meningkatkan PDRB, dengan peningkatan *output* dari sektor industri maka tentu saja berdampak positif terhadap PDRB.

**Tabel 1.3 Laju PDRB Menurut Harga Konstan Industri Pengolahan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021**

| Tahun | Laju PDRB Menurut Harga Konstan (Persen) | PDRB Menurut Harga Konstan (Miliar Rupiah) |
|-------|---|---|
| 2017 | 5,32 | 578.703,24 |
| 2018 | 6,52 | 616.427,07 |
| 2019 | 3,95 | 640.760,96 |
| 2020 | -4,36 | 612.799,43 |
| 2021 | 4,22 | 638.689,32 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Berdasarkan data di atas, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat sektor industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar 3,95% dengan total Rp640,76 triliun dan pada tahun selanjutnya 2020 mengalami penurunan karena adanya wabah pandemi Covid-19 dengan laju PDRB -4,36% dengan total PDRB sektor industri sebesar Rp612,78 triliun. Angka laju PDRB tertinggi pada lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2018 dengan angka 6,52% dengan total Rp616,43 triliun. Dengan adanya usaha dari pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 membuahkan hasil yang cukup terlihat dalam keadaan sosial dan perekonomian yang akhirnya pada tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat kurva PDRB meningkat ke angka 4,22% dengan jumlah sebesar Rp638,69 triliun.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektivitasnya.

Untuk melihat gambaran perkembangan PDRB menurut harga konstan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut:

**Tabel 1.4 PDRB Atas Harga Konstan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

| Kab/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten | | | | | |
| Bogor | 139.561,45 | 148.203,35 | 156.876,01 | 154.113,60 | 159.582,65 |
| Sukabumi | 41.716,23 | 44.140,89 | 46.628,34 | 46.199,31 | 47.933,52 |
| Cianjur | 28.538,99 | 30.320,21 | 32.039,32 | 31.790,76 | 32.897,52 |
| Bandung | 73.039,45 | 77.613,22 | 82.547,44 | 81.059,06 | 83.947,15 |
| Garut | 35.464,91 | 37.225,15 | 39.092,49 | 38.598,15 | 39.981,19 |
| Tasikmalaya | 22.063,29 | 23.320,61 | 24.586,67 | 24.344,86 | 25.179,48 |
| Ciamis | 19.826,75 | 20.878,69 | 22.001,24 | 21.970,41 | 22.774,93 |
| Kuningan | 14.866,62 | 15.821,96 | 16.864,15 | 16.882,76 | 17.483,02 |
| Cirebon | 30.623,31 | 32.161,84 | 33.668,10 | 33.304,49 | 34.128,55 |
| Majalengka | 18.789,49 | 20.006,88 | 21.561,72 | 21.754,54 | 22.788,75 |
| Sumedang | 21.276,70 | 22.507,96 | 23.932,73 | 23.665,01 | 24.414,66 |
| Indramayu | 57.515,01 | 58.287,98 | 60.153,18 | 59.200,00 | 59.544,87 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Subang | 26.250,72 | 27.408,20 | 28.672,90 | 28.342,56 | 29.023,19 |
| Purwakarta | 42.239,30 | 44.341,65 | 46.278,21 | 45.293,24 | 46.840,15 |
| Karawang | 148.358,44 | 157.317,84 | 163.946,85 | 157.710,59 | 166.941,49 |
| Bekasi | 228.203,60 | 241.949,38 | 251.502,79 | 242.959,09 | 251.828,57 |
| Bandung Barat | 28.330,02 | 29.888,89 | 31.398,35 | 30.640,41 | 31.701,79 |
| Pangandaran | 6.939,64 | 7.308,73 | 7.742,87 | 7.738,97 | 8.022,78 |
| Kota | | | | | |
| Bogor | 28.654,97 | 30.413,57 | 32.295,73 | 32.162,74 | 33.372,48 |
| Sukabumi | 7.780,42 | 8.209,92 | 8.664,02 | 8.534,72 | 8.851,05 |
| Bandung | 172.851,96 | 185.084,18 | 197.642,89 | 193.144,95 | 200.414,03 |
| Cirebon | 14.893,14 | 15.817,18 | 16.812,49 | 16.648,44 | 17.154,55 |
| Bekasi | 62.202,01 | 65.845,09 | 69.406,53 | 67.619,24 | 69.796,94 |
| Depok | 42.981,28 | 45.978,89 | 49.076,58 | 48.135,59 | 49.946,93 |
| Cimahi | 19.907,13 | 21.192,60 | 22.856,04 | 22.340,56 | 23.275,78 |
| Tasikmalaya | 14.027,95 | 14.859,11 | 15.746,12 | 15.430,02 | 15.981,25 |
| Banjar | 2.919,72 | 3.067,11 | 3.221,45 | 3.251,70 | 3.364,26 |
| Jawa Barat | 1.343.662,14 | 1.419.624,14 | 1.490.959,69 | 1.453.380,72 | 1.507.746,39 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Pada tabel 1.4 terlihat bahwa nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai PDRB terbesar berada di Kab. Bekasi yaitu sebesar Rp228.203,60 miliar pada tahun 2017 dan di tahun 2021 menjadi sebesar Rp251.828,57 miliar. Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai PDRB terbesar kedua adalah Kota Bandung yang memiliki nilai PDRB sebesar Rp172.851,96 miliar pada tahun 2017 dan di tahun 2021 sebesar Rp200.414,03 miliar. Wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai PDRB terbesar ketiga adalah Kab. Karawang yang memiliki nilai PDRB sebesar Rp148.358,44 miliar pada tahun 2017 dan di tahun 2021 sebesar Rp166.941,49 miliar.

Terdapat 19 sektor lapangan usaha yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dari banyaknya sektor lapangan usaha tersebut yang berkontribusi besar dalam pembentukan PDRB tersebut adalah sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta pertanian. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1.5 Distribusi Persentase PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

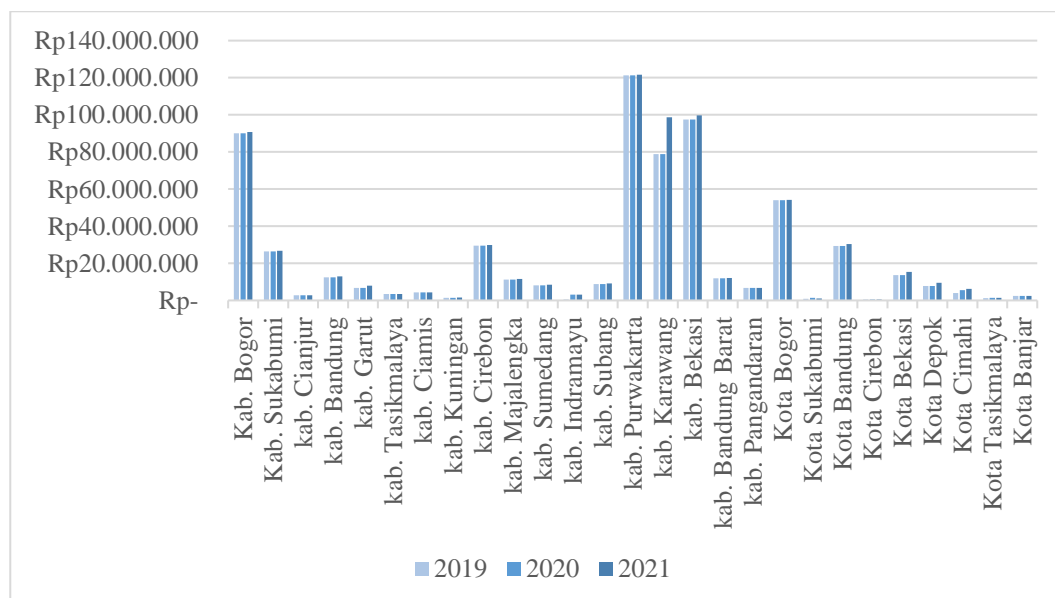
| No. | Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 8,55 | 8,68 | 8,78 | 9,22 | 8,54 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 1,43 | 1,36 | 1,25 | 1,11 | 1,16 |
| 3. | Industri Pengolahan | 42,23 | 42,19 | 41,60 | 41,11 | 41,80 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,51 |
| 5. | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 6. | Konstruksi | 8,25 | 8,45 | 8,54 | 8,21 | 8,67 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 15,08 | 14,88 | 15,24 | 14,58 | 14,46 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 5,79 | 5,68 | 5,52 | 5,24 | 4,99 |
| 9. | Penyedia Akomodasi dan Makan Minum | 2,71 | 2,79 | 2,88 | 2,92 | 2,83 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 2,90 | 2,87 | 2,87 | 3,92 | 3,95 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,80 | 2,79 | 2,71 | 2,80 | 2,93 |
| 12. | <i>Real Estate</i> | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,13 | 1,19 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 0,40 | 0,41 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,42 | 2,32 | 2,31 | 2,21 | 2,06 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 2,87 | 3,02 | 3,21 | 3,63 | 3,52 |

| No. | Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,75 | 0,75 | 0,79 | 0,78 | 0,80 |
| 17. | Jasa Lainnya | 2,06 | 2,09 | 2,15 | 2,16 | 2,05 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Tercatat sektor industri pengolahan yang paling banyak berkontribusi terhadap PDRB Jawa Barat pada tahun 2021 dengan nilai 41,8%, jika dibandingkan dengan sektor pertanian yang hanya mencatat 8,54%. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan dengan nilai 14,46%.

Faktor lainnya yang memberi pengaruh terhadap serapan tenaga kerja adalah investasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 1.3 yang menunjukkan penyerapan investasi sektor industri berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.



Sumber: Open Data Jabar

Gambar 1.3 Investasi Sektor Industri di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Gambar di atas menunjukkan perkembangan investasi dari tahun 2019-2021 berdasarkan Kab/Kota di Jawa Barat. Kementerian Investasi/BKPM menyampaikan penyerapan tenaga kerja meningkat dari 311.793 pekerja di kuartal pertama, 311.922 pekerja di kuartal kedua dan 288.687 pekerja di kuartal ketiga. Pada tahun 2021 penyerapan investasi di Kab/Kota selama 5 tahun terakhir menjadi yang paling tinggi. Kab. Purwakarta tercatat menjadi salah satu daerah terbaik dalam soal pembinaan investasi pemodal asing dan dalam negeri di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dikutip dari Kementerian Perindustrian, kondisi makro ekonomi Kab. Karawang sangat mendukung untuk menjadi pusat pertumbuhan industri dan investasi, dimana pada tahun 2021 Kab. Purwakarta menyerap investasi pada sektor industri sebesar Rp121,59 triliun. Kemudian Kab. Bekasi juga menerima investasi terbanyak kedua setelah Kab. Purwakarta, dengan menerima investasi sebesar Rp99,69 triliun. Selanjutnya disusul oleh Kab. Karawang dengan menyerap dana investasi sebesar Rp98,68 triliun. Sementara Kota Cirebon pada tahun 2021 menjadi wilayah penyerap dana investasi terendah sebesar Rp546,65 miliar, selanjutnya disusul oleh Kota Sukabumi sebesar Rp963,97 miliar. Kedua kawasan tersebut mengalami kesulitan dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan pembatasan berbagai kegiatan di masyarakat. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kota kedua wilayah tersebut akan semakin mempermudah investor datang untuk menanamkan modalnya.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak lepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan untuk mendukung investasi yang baik, standar pendapatan

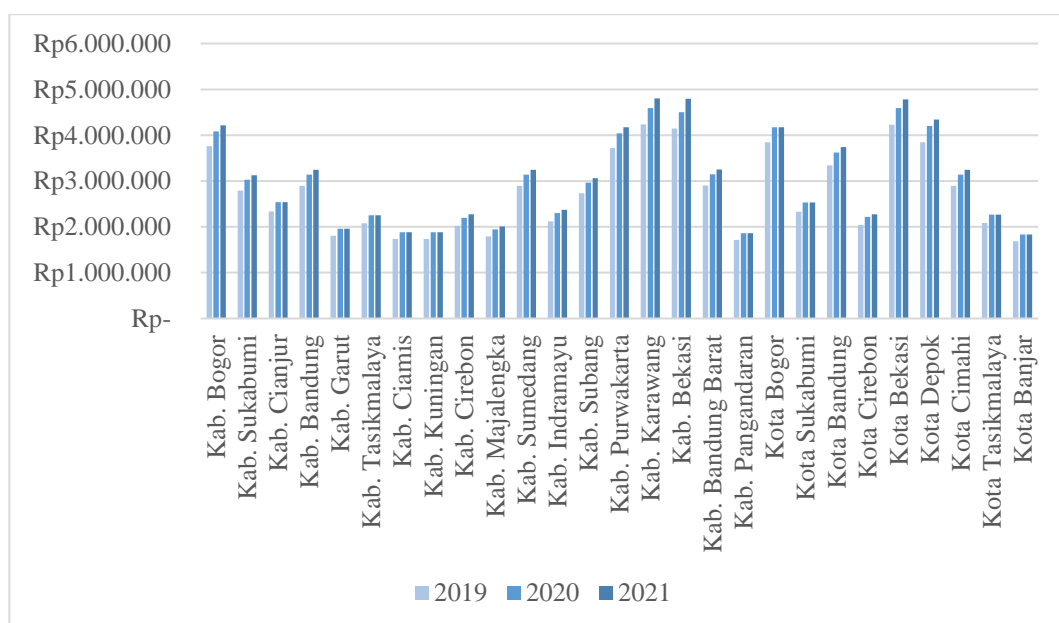
untuk kesejahteraan tenaga kerja dan strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal.

Indikator lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu tingkat upah. Meningkatnya upah akan memberi dampak pada turunnya jumlah permintaan tenaga kerja. Kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Sehingga pengusaha terdorong untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum (Kuncoro, 2002 dalam Permana Siregar dkk., 2022).

Tingkat upah merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam masalah ketenagakerjaan. Hal ini karena keinginan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila tingkat upah yang ditawarkan oleh pengusaha dinilai tidak mencukupi oleh pekerja, maka pekerja tersebut tidak akan menerima pekerjaan yang ditawarkan. Sebaliknya, ada juga yang bekerja dengan tingkat upah yang berapapun. Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Hal ini karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap kota berbeda-beda, maka disebut upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga

kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum regional (UMR), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat buruh dan serikat pengusaha, dan perbedaan tenaga kerja. Gambar 1.4 menunjukkan kondisi UMK di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.4 Perkembangan Upah Minimum Kab/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Rupiah)

Upah Minimum dari tahun 2019 sampai dengan 2021 selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi ada di Kab. Karawang dimana pada tahun 2019 sebesar Rp4.234.010, kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp4.594.324 dan pada tahun 2021 sebesar Rp4.798.312. Selanjutnya UMK tertinggi kedua ada di Kab. Bekasi dimana pada tahun 2019 sebesar Rp4.146.126, kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp4.498.961

dan pada tahun 2021 sebesar Rp4.791.843. Mengingat kedua kawasan tersebut sudah terbangun akses dan infrastrukturnya serta kawasan industri besar padat modal, seperti pembuatan mobil. Adapun UMK terendah pada tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat ada di Kota Banjar dimana sebesar Rp1.831.884. Selain Kota Banjar, ada empat wilayah lainnya yang memiliki UMK di bawah dua juta rupiah, antara lain Kab. Garut sebesar Rp1.961.085, Kab. sebesar Kuningan sebesar Rp1.882.642, Kab. Ciamis sebesar Rp1.880.654, dan Kab. Pangandaran sebesar Rp1.860.591. Kelima wilayah yang dikategorikan dengan UMK terendah di Provinsi Jawa Barat tersebut disebabkan karena pandemi Covid-19, terdapat 10 kabupaten/kota di Jawa Barat tidak menaikkan UMK tahun 2021 sesuai Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Sisanya, ada 17 kabupaten/kota yang menang ada kenaikan UMK dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan jumlah unit usaha sektor industri serta upah minimum secara parsial

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?

2. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan jumlah unit usaha sektor industri serta upah minimum secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
3. Bagaimana elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor industri sebagai akibat perubahan produk domestik regional bruto, investasi, dan jumlah unit usaha sektor industri serta upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan jumlah unit usaha sektor industri serta upah minimum secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto, investasi dan jumlah unit usaha sektor industri serta upah minimum secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor industri sebagai akibat perubahan produk domestik regional bruto, investasi dan

jumlah unit usaha sektor industri serta upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelaraskan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu ekonomi pada Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi bahan referensi untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat sebagai bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di 18 Kabupaten yang ada di Jawa Barat meliputi Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat dan Pangandaran. Beserta 9 Kota di Jawa Barat

yang meliputi Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui *website* resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kab/Kota di Jawa Barat, Open Data Jabar dan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober tahun 2022 yang diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan.

